



## PENDIDIKAN ERA GLOBAL

“Globalisasi Pendidikan Atau Pendidikan Islam Berwawasan Global”

OLEH : SUNARDI

STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

[nadichayankhimmahnw@gmail.com](mailto:nadichayankhimmahnw@gmail.com)

### Abstrak

Pendidikan merupakan wasilah (sarana) yang paling magis untuk membangun kualitas manusia secara total dan maksimal. Keberlangsungan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan peradaban manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Lebih-lebih di era globalisasi saat ini. Pendidikan harus mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan di masa kini dan mendatang. Untuk menjawab tantangan dan perubahan tersebut, maka lembaga pendidikan Islam harus mampu menawarkan berbagai produk keilmuan, baik dari segi informasi, teknologi, dan seni yang dihiasi dengan moral dan budi pekerti guna untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri, mampu memperbaiki tatanan sosial masyarakat dan juga bangsa yang berprinsip pada nilai-nilai Islami.

**Keyword : Pendidikan, Tantangan, Perubahan, Moral, Globalisasi, Islam**

### A. Prolog

Semangat dan cita – cita pendidikan di Indonesia jelas tergambar pada Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) pada Pasal 31 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 31 ayat satu dan dua menjelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. pada ayat dua dijelaskan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”.<sup>1</sup>

Pendidikan bukan hanya sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih adab manusia untuk mengaktualisasikan kualitas luhur kemanusiaan. Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bahkan bukan sekedar penerapan “teori belajar” di kelas atau menggunakan hasil ujian prestasi yang berpusat pada mata pelajaran. Tetapi, menurut Jerome Bruner sebagaimana yang ditulis oleh Syaiful Sagala dalam bukunya bahwa pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya, dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Dan juga Clark Kerr menganggap pendidikan memiliki peran ganda dan seimbang dalam masyarakat industry, yakni memberikan pengetahuan dasar dan kecakapan baru yang sangat diperlukan serta melindungi kemajuan dan kebebasan, melalui kebebasan akademik dan pendidikan individu dalam masyarakat demokratis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), 119-120.

<sup>2</sup> Saiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan “Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan”*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 3.



Pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, berdasarkan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai agama, cultural dan pluralitas bangsa. Maka pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Di samping itu, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna berdasarkan asas legalitas. Prinsip lainnya yang turut mendasari penyelenggaraan pendidikan adalah prinsip yang diterapkan oleh bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, (1) *Ing Ngarsa Sung Taladha*, (2) *Ing Madya Mangun Karsa*, (3) *Tut Wuri Handayani*, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pengelolaannya. Agar tercapai tujuan yang diinginkan, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>3</sup>

Dalam konteks saat ini, sistem pendidikan Indonesia sebenarnya telah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Indonesia saat ini tidak lagi membutuhkan manusia-manusia yang cerdas dalam intelektual semata, Indonesia tidak membutuhkan manajer dalam memajukan bangsa ini, tapi yang lebih dibutuhkan adalah manusia-manusia yang cerdas secara emosional dan spiritual, karena dengan kedua kecerdasan inilah yang akan mengontrol perilaku menyimpang manusia yang disebabkan karena seseorang hanya cerdas secara intelektual. Sebagai contoh, perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disingkat KKN acap kali dipertontonkan oleh orang-orang pintar berdasar di negeri ini, amanat yang telah diberikan oleh rakyat diabaikan begitu saja, mereka hanya mementingkan status quo, perilaku oportunistik, dan lain sebagainya seolah dianggap hal biasa dan kewajiban tanpa salah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pendidikan Islam dianggap memiliki tanggung jawab yang sama dengan apa yang menjadi harapan pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena pendidikan memegang peranan dan amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945; “ Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa”. Kita harus mengakui bahwa Pendidikan Nasional telah cukup banyak memainkan peranannya secara positif, akan tetapi belum maksimal.<sup>4</sup>

Dengan berbagai persoalan di atas, maka perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh Pemerintah, guna memperoleh konsep ideal dalam dunia pendidikan sehingga diharapkan mampu mencetak dan membentuk karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Kurikulum berganti kurikulum, mulai dari kurikulum 1994 (CBSA), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan terakhir Kurikulum 2013 (K 13) yang rencananya akan diformat kembali menjadi Kurikulum Nasional. Secara khusus kurikulum Pendidikan

---

<sup>3</sup> Sam M. Chan & Tuti T. Sam, *Analisis SWOT “ Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah ”*, (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2005), 128.

<sup>4</sup> Samsul Nizar (ed). *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013), vi.



Islam yang ditawarkan terkesan upaya bongkar pasang, statis, kurang progresif, dan kehilangan ruh vital ke-Islamannya. Bongkar pasang dimaksudkan karena kurikulum dibangun dalam kerangka trial and error dan tidak berangkat dari pendekatan filosofis-sosiologis yang objektif.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Pendidikan Islam mampu hadir untuk memberikan solusi bagi keberlangsungan pendidikan secara bermartabat, yang dihiasi dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

#### B. Tantangan Pendidikan Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Ketika gagasan desentralisasi pemerintahan diterapkan pada tahun 2001 dan 2002, maka urusan pendidikan ikut juga didesentralisasi. Mulai dari pengelolaan dan pengembangan pendidikan yang bersifat sentralistik kepada menuju dentalistik.

Kebijakan ini semakin jelas ditampakkan melalui praktik-praktik yang terjadi di sejumlah daerah yang bersedia melakukan berbagai eksperimen pendidikan. Kebijakan tersebut menyebabkan sistem-sistem dan keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan yang diperlukan untuk mengimplementasikan cara baru dengan semangat desentralisasi.

Kaitan dengan masalah ini, Tilaar berependapat bahwa desentralisasi merupakan suatu keniscayaan. Dan desentralisasi mengandung beberapa urgensi dalam kaitannya dengan pendidikan. Diantaranya : 1) untuk membangun masyarakat yang demokratis, 2) membangun *social capital*, dan 3) meningkatkan daya saing bangsa.<sup>5</sup>

Implementasi undang-undang ini tidak hanya member harapan perubahan dalam membangun manusia Indonesia yang lebih bertanggung jawab dan demokratis. Namun juga dapat memunculkan beberapa persoalan dan tantangan baru bagi tata kelola pendidikan. Di antara sejumlah alasan yang terdengar adalah ;

- a) Belum memadainya sumber daya manusia di masing-masing daerah
- b) Keadaan sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan lengkap
- c) Anggara pendapatan asli daerah masing daerah yang tidak merata (rendah)
- d) Secara psikologis, mental yang belum siap untuk menghadapi sebuah perubahan bahkan sebagian masyarakat alergi terhadap perubahan.<sup>6</sup>

Berbagai problematika ini akan muncul, dapat saja dikarenakan oleh analisi data hasil analisis data empiris tentang manajemen dan tata kelola daerah yang belum disukung oleh data dan informasi yang akurat, adanya tekanan dari masyarakat untuk memecahkan masalah secara instan.<sup>7</sup>Harus diakui, bahwa secara empiris dan realitas di

<sup>5</sup> H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 20.

<sup>6</sup> Sam M. Chan & Tutik T. *Analisis SWOT...2*.

<sup>7</sup> Syaipul Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan ...2*.



lapangan masih banyak daerah-daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat dengan alasan yang telah disebutkan di atas.<sup>8</sup>

### C. Pendidikan Sebagai Proses Pemberdayaan dan Pembebasan

Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi empat tantangan besar dan kompleks,<sup>9</sup> yaitu ; *Pertama*, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*), yakni bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktifitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan struktur masyarakat, dari masyarakat yang agraris menuju masyarakat yang industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

*Ketiga*, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks). *Keempat*, munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggentikan kolonialisme politik. Dengan demikian kolonialisme hari ini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi global. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk computer dan internet, sehingga bangsa Indonesia sangat bergantung kepada bangsa-bangsa yang telah lebih dulu menguasai teknologi informasi. Inilah bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam virtual enemy yang telah merasuk ke seluruh pelosok dunia saat ini.<sup>10</sup>

Oeh karena itu pendidikan saat ini bukan lagi berorientasi pada pengajaran, bukan sekedar transfer ilmu belaka. Pendidikan hari ini haruslah beorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat objektif atau subjektif, tapi harus kedua-duanya. Kebutuhan objektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subjektif (kesadaran subjektif) untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi, yang terjadi sekitarnya.<sup>11</sup>

Lebih dari itu, pendidikan yang diperlukan sekarang bukan hanya sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih adab manusia untuk mengaktualisasikan kualitas luhur kemanusiaan. Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bahkan bukan sekedar penerapan “teori belajar” di kelas atau menggunakan hasil ujian prestasi yang berpusat pada mata pelajaran. Tetapi,

<sup>8</sup> Dalam hal ini, terdapat perbedaan sikap yang terjadi di masyarakat dalam menyikapi kebijakan desentralisasi, diantaranya sebagian mereka menyambut dengan gembira dan senang hati, ada yang menganggap desentralisasi merupakan konsekuensi dari perkembangan politik pemerintahan, bahkan ada yang merasa pesimis dan skeptis. Pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan desentralisasi pendidikan dikarenakan harus tetap terikat dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonomi. (Lih. Sam M. Chan & Tutik T, *Analisis SWOT...2007*)

<sup>9</sup> Ali Idrus. *Manajemen Pendidikan Global “Visi, Aksi & Adaptasi”*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), iii.

<sup>10</sup> Ali Idrus, *Manajemen...iii*.

<sup>11</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan “Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan”* Cet. iv, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. xii



menurut Jerrrome Bruner sebagaimana yang ditulis oleh Syaipul Sagala dalam bukunya bahwa pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya, dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Dan juga Clark Kerr menganggap pendidikan memiliki peran ganda dan seimbang dalam masyarakat industry, yakni memberikan pengetahuan dasar dan kecakapan baru yang sangat diperlukan serta melindungi kemajuan dan kebebasan, melalui kebebasan akademik dan pendidikan individu dalam masyarakat demokratis.<sup>12</sup>

#### D. Pendidikan antara Kekuasaan dan Kebijakan

Masalah pendidikan tidak pernah lepas dari kepentingan penguasa. Kekuasaan dianggap sebagai hal yang paling menentukan kebijakan pendidikan. Belakangan ini kita dipernalkan konsep baru tentang manajemen sekolah yang dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Manajement*). Keadaan ini diawali dengan diterapkannya UU nomor 20 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Kekuasaan diartikan sebagai hubungan rasa, artinya kekuasaan secara penuh dapat mewujudkan semua keinginan.<sup>13</sup> Dan menurut Paulo Fraire, kekuasaan dianggap sebagai kekuatan yang negative dan juga positif. Menurutnya kekuasaan yang eksklusif dianggap sebagai kekuatan negative. Sedangkan daya dorong dari semua perilaku manusia dalam mempertahankan hidupnya, berjuang dan berusaha mewujudkan cita-cita kehidupannya yang lebih baik dianggap sebagai kekuasaan yang positif.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan kekuasaan, Wohlsteter dan Mohrman mengatakan bahwa terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS, yaitu ; *power/authority, knowledge, information, dan reward*. Keempatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan meneuntut keberadaannya.

Kekuasaan/kewenangan (*power/authority*) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah.<sup>15</sup> Sedikitnya terdapat tiga bidang penting, yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru dan staf sekolah. Kepala sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah. Kekuasaan yang dimiliki kepala sekolah

<sup>12</sup> Saiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan ...*3.

<sup>13</sup> C. Wright Mills dalam Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global...*4

<sup>14</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan...*hal. 16

<sup>15</sup> Hal ini dapat terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi, khususnya pada pasal 2 butir 11 bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, diantaranya terdapat tujuh hal yang penetapannya masih menjadi kewenangan pusat. Diantaranya berhubungan dengan standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional, standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, biaya penyelenggaraan pendidikan, penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswamahasiswa, dan kalender akademik. Lebih jelas lihat lampiran 3 tentang PP nomor 25 tahun 2000 dalam E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : Rosda Karya, 2002), 194-214.



akan berjalan dengan efektif apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama guru dan orang tua siswa.<sup>16</sup>

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebaiknya tidak dilakukan melalui mekanisme penyerahan kekuasaan birokrasi dari pusat ke daerah, karena kekuasaan telah terbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Melalui strategi “desentralisasi pemerintah di bidang kekuasaan”, depdiknas tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan, tetapi berkepentingan dalam mewujudkan otonomi satuan pendidikan, Depdiknas memiliki keleluasaan dalam membangun kapasitas setiap penyelenggara pendidikan.<sup>17</sup>

Kekuasaan yang diberikan dalam desentralisasi bukan merupakan kekuasaan mutlak dan bebas. Proses pelaksanaan kekuasaan dalam pendidikan harus memperhatikan beberapa hal penting, diantaranya yaitu ;

1. Apabila kita lihat pendidikan sebagai suatu proses, maka yang diinginkan untuk dihasilkan adalah bukan suatu komoditi produk industry. Proses pendidikan diorientasikan untuk menghasilkan manusia yang bebas, yang mempunyai akal dan budi dalam mengambil keputusan.
2. Kekuasaan itu juga akan dibatasi dengan kekuasaan individu lainnya. Kekuasaan dalam pendidikan adalah kekuasaan yang terbatas tetapi sekaligus bebas untuk dikembangkan oleh individu-individu dalam mengembangkan individunya sendiri melalui partisipasi antar sesamanya dalam lingkungan pendidikan.
3. Kemonikasi pendidik dan peserta didik. Dalam kemonikasi pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar ditentukan pula oleh hubungan kekuasaan antara keduanya.
4. Kurikulum. Hubungan antara kekuasaan dan kurikulum berkaitan erat dengan epistemologi yang berkembang dimasyarakat. Penyusunan kurikulum dewasa ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah pusat.
5. Pendidikan dan politik. Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa pendidikan telah menjadi alat politik praktis dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan proses pendidikan demokratis.
6. Pendidikan dan ekonomi. reformasi pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa reformasi ekonomi suatu bangsa.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sangat dibutuhkan dalam mengembang dunia pendidikan saat ini. Tetapi bukan kekuasaan yang bebas tanpa batas, kekuasaan yang dimaksudkan semata-mata diberikan untuk mengembang dan mentransformasikan pendidikan ke arah yang lebih baik dan bermartabat.

#### E. Problematika Pendidikan Moral dan Budi Pekerti

<sup>16</sup> Namun hal ini juga dapat menjadi tantangan dalam penerapan desentralisasi pendidikan. Pemegang kekuasaan dikhawatirkan akan berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimiliki. Lihat. Susan Albers Mohrman, *Priscilla Wohlsteter and associates, School Based Management : Organizing for High Performance*, (San Francisco : Jossey Bass, 1994), 37.

<sup>17</sup> Ali Idrus, *Manajemen...* 2

<sup>18</sup> Ali Idrus, *Manajemen...* 19





Hubungan antara pendidikan dan persoalan-persoalan social terasa semakin penting mengingat semakin rumitnya kehidupan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan masyarakat untuk mengkaji persoalan-persoalan ekonomi, budaya, pendidikan anak, serta cara mengatasi permasalahan sosio-politik tidak dapat diserahkan begitu saja kepada para sarjana ilmu social, tetapi harus dikaitkan dengan landasan-landasan dan prinsip-prinsip ilmu pendidikan.

Salah satu tugas utama pendidikan adalah untuk membuat peserta didik dan atau masyarakat menjadi dewasa, mandiri, berwawasan, dan berbudaya luhur sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif dan universal. Untuk itu pendidikan perlu dirancang secara proaktif terhadap berbagai kecendrungan perubahan di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit berupa adanya gejala dekadensi moral dalam praktik berbangsa dan bernegara. Keadaan ini sungguh sangat ironis, padahal tujuan pendidikan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional kita sudah lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur.<sup>20</sup>

Proses pendidikan di semua jenjang dan jalur perlu melihat realitas masyarakat kita yang sebenarnya. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami sakit yang sudah akut. Kekerasan merajalela, disintegrasi social tumbuh secara nyata, intoleransi semakin merebak dalam berbagai aspek kehidupan, korupsi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu, tawuran antar pelajar hamper setiap hari dipertontonkan, premanisme ada di mana-mana, gaya hidup modern yang tanpa didasari dengan akhlak dan budi pekerti.

Hal lain yang juga menunjukkan indikator budi pekerti dan moral yang gersang adalah banyaknya bterjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sekolah di bawah umur, bahkan tindakan criminal lainnya seperti mencuru, menodong, narkoba semua pelakunya adalah anak sekolah.<sup>21</sup>

Fenoma-fenomena di atas tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dicari jalan keluarnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu instrument perubahan yang mampu melakukan empowerment bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya rekonstruksi social.

Berkaitan dengan beberapa persoalan di atas, di bawah ini akan diuraikan urgensi penanaman nilai moral dan budi pekerti ( akhlak) dalam pendidikan sebagaimana yang ditulis Abuddin Nata.<sup>22</sup> Di antaranya yaitu ;

<sup>19</sup> Ali Idrus, *Manajemen...*79

<sup>20</sup> Sistem pendidikan nasional Indonesia dengan tegas merumuskan tujuan pendidikan dalam uu sisdikna nomor 20 tahun 2003 pada bab II tentang fungsi dan tujuan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

<sup>21</sup> Sam M. Chan & Tutik t., *Analisi...*19

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal.



*Pertama*, pemahaman tentang akhlak akan dapat membantu merumuskan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia agar memiliki akhlak mulia atau kepribadian yang unggul yang ditandai oleh adanya integritas kepribadian utuh, satunya hati dan perbuatan, memiliki tanggungjawab terhadap dirinya, masyarakat, dan bangsa. Serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, pemahaman tentang akhlak akan membantu dalam merumuskan cirri-ciri dan kandungan kurikulum. Yaitu menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan pembelajaran, dan betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh, serta disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik.

*Ketiga*, pemahaman terhadap akhlak akan membantu sekolah dalam merumuskan kode etik dan tata tertib sekolah, khususnya yang berkaitan peserta didik. Keempat, pemahaman terhadap akhlak akan membantu dalam menentukan metode dan pendekatan yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar guna melahirkan manusia yang memiliki budi pekerti dan karakter yang unggul.<sup>23</sup>

*Dan yang terakhir*, pemahaman terhadap akhlak akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, aman, damai dan nyaman, sehingga akan mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti (moral) yang baik kepada peserta didik sangat dibutuhkan dan diutamakan guna dapat dijadikan sebagai proteksi dari pengaruh budaya-budaya luar yang cenderung bebas, dan tanpa memperhatikan nilai dan norma agama, terutama dalam menghadapi budaya dan arus globalisasi yang semakin merajalela.

#### F. Pendidikan dan Tantangan Globalisasi

Saat ini seluruh Negara di dunia diwarnai oleh arus globalisasi termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Sebagai salah satu Negara yang ikut dalam kontestasi pasar persaingan dunia (*the perfect market*)<sup>24</sup> Indonesia sibuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum.<sup>25</sup> Dalam proses reformasi yang sedang berlansung saat ini, ada gejala ke arah dilupakannya peran pendidikan. Hal ini sungguh amat berbahaya, yang ongkosnya di masa mendatang harus dipikul oleh seluruh komponen bangsa berupa keterbelakangan dan kebodohan kolektif.

---

<sup>23</sup> Tujuan ini dapat dilaksakan dengan memberikan beberapa tips kepada peserta didik, seperti : 1) mengembangkan dan memperluas wawasan dan cara pandang. Hal ini penting dilakukan karena salah satu sebab timbulnya perbuatan buruk seperti mencuri, membunuh dan lain sebagainya adalah karena pikiran yang sempit. 2), berteman dengan orang-orang yang saleh. 3) membaca kisah-kisah teladan, dan lain sebagainya.

<sup>24</sup> Konsep pasar persaingan sempurna (*the perfect market*) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seluruh pemain dalam suatu pasar persaingan bebas masuk dan keluar pasar sesuai dengan pertimbangan rasionalnya masing-masing. Pada pasar tersebut produk yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa. Dalam era pasar bebas tersebut ikatan territorial kewilayahan sebuah Negara menjadi demikian longgar, terutama Negara-negara yang terikat dengan perjanjian-perjanjian multilateral dengan Negara-negara lain, baik dalam suatu kawasan atau antar kawasan. Konsep inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai era globalisasi.

<sup>25</sup> Saat memasuki 1 Januari 2003, Indonesia telah memasuki era pasar bebas untuk kawasan asia tenggara yang lebih dikenal dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) 2003. Konsep AFTA ini mengandung pengertian bahwa Negara-negara di kawasan asia tenggara atau Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan program pasar bebas ASEAN. Dan pada tahun 2011 di sepakati juga CAFTA (*Cina-ASEAN Free Trade Area*), serta awal 2015 Indonesia sudah ikut MEA.





Proses globalisasi nampaknya tidak boleh diabaikan oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini. Pembangunan nasional sebuah bangsa tidak hanya melihat kebutuhan internal masyarakat dan bangsa itu sendiri, tetapi juga pembangunan ke luar dan menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Globalisasi telah menimbulkan gaya hidup baru yang tampak dengan jelas di kota-kota besar dan semakin merebak merasuki sendi-sendi kehidupan yang dulunya terisolasi.

Kaitan dengan globalisasi, para ahli berpendapat bahwa kekuatan globalisasi bertumpu pada 4 kekuatan global. Yaitu ;

- 1) Kemajuan IPTEK terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inivasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.
- 2) Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan IPTEK.
- 3) Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas Negara.
- 4) Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan meningkatnya kedaran bersama dalam alam demokrasi.<sup>26</sup>

Dalam kondisi yang demikian itu, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh sebuah Negara yaitu melaksanakan atau mereformasi sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem produksi, dan yang paling penting adalah membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan era pasar bebas tersebut. Dan dalam hal ini adalah merekonstruksi dan reformasi dunia pendidikan.

Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat global demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaa, dan bertanggungjawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala factor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang dapat menyebabkan kegagalan. Salah satu alternative yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global, bukan globalisasi pendidikan.

Harus kita akui, bahwa salah satu dampak globalisasi bagi dunia pendidikan adalah dengan banyaknya investor asing yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan beberapa sekolah internasional. Hal ini dapat dilihat dari sekolah-sekolah yang dikenal dengan bilingual school, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa inggris dan mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu, berbagai jenjang perguruan menengah dan tinggi baik negeri maupun swasta mulai membuka program kelas internasional.

Sebagaiman kita maklumi bersama, selama ini kita melihat ada sekolah internasional yang didirikan oleh kedutaan besar India dengan *Gandhi Memorial School*, kedutaan besar Amerika dengan *Jakarta International School (JIS)*, Australia, dan lain-lain. Sejak reformasi digulirkan, beberapa penanaman modal asing yang melakukan

---

<sup>26</sup> Ali Idrus, *Manajemen...*47.



kerjasama dengan pemodal dalam negeri mencoba mendirikan sekolah-sekolah, seperti sekolah Pelita Harapan dan Yayasan Sekolah Tunas Muda.<sup>27</sup>

Hadirnya globalisasi pendidikan diakui memiliki beberapa dampak positif, diantaranya :

- 1) Akan semakin mudahnya akses informasi.
- 2) Globalisasi pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan.
- 3) Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan Negara-negara lain.
- 4) Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing.
- 5) Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>28</sup>

Namun globalisasi pendidikan tidak selamanya membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, melainkan globalisasi memiliki dampak negative yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Antara lain ;

- 1) Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal.
- 2) Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang akan memunculkan budaya serba instan.
- 3) Globalisasi akan mengakibatkan terkikisnya kebudayaan bangsa akibat dari masuknya budaya luar.
- 4) Globalisasi pendidikan akan memaksa liberalisasi berbagai sector yang dulunya non komersial menjadi komoditas pasar.
- 5) Globalisasi pendidikan mengakibatkan melonggarnya kekuatan control oleh Negara.<sup>29</sup>

Selanjutnya, pendidikan berwawasan global dapat dikaji melalui dua perspektif. Yaitu perspektif Kurikuler dan Perspektif Reformasi. Pendidikan berwawasan global perspektif kurikuler merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesioanl dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami kehidupan dalam kaitan masyarakat dunia, dengan cirri-ciri :

- 1) Mempelajari budaya, social, politik, dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan.
- 2) Mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat.
- 3) Mengembangkan berbagai kemungkinan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Pada sekolah-sekolah tersebut, guru yang mengajar tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga terdapat guru-guru yang berasal dari Negara yang bersangkutan atau dari Negara penanam modal. Guru-guru Indonesia yang akan mengajar harus memiliki kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan oleh mereka. Baca Sam M. Chan & Tutik T. *Analisi...* 143.

<sup>28</sup> Ali Idrus, *Manajemen...* 48.

<sup>29</sup> Ali idrus, *Manajemen....* 49.



Berdasarkan Perspektif Reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Pendidikan harus mengaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Oleh karena itu sekolah harus memiliki orientasi nilai. Pendidikan berwawasan global harus bersifat *Sistemik-Organik*, dengan ciri-ciri *Fleksibel-Adaptif*, dan *Kreatif-Demokratis*.

Bersifat *Sistemik-Organik* berarti sekolah merupakan sekumpulan proses yang bersifat interaktif yang tidak dapat dilihat sebagai hitam putih, melainkan setiap interaksi harus dilihat sebagai satu bagian dari keseluruhan interaksi yang ada. *Fleksibel-Adaptif* berarti pendidikan lebih ditekankan sebagai suatu proses learning daripada teaching. Peserta didik dirangsang memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu yang harus dipelajari dan continues learning. Tetapi peserta didik tidak dipaksa mempelajari sesuatu yang tidak diinginkan. Materi yang dipelajari bersifat integrated, materi yang satu dengan yang lain dikaitkan secara padu dalam open-sistym environment.

*Kreatif-Demokratis* berarti pendidikan senantiasa menekankan pada suatu sikap mental untuk senantiasa menghadirkan sesuatu yang baru dan orisinil. Secara paedagogis, kreativitas dan demokrasi merupakan dua sisi dari mata uang. Tanpa demokrasi tidak akan ada kreatifitas, sebaliknya demokrasi tanpa kreatifitas tidak akan bermakna.

Implikasi dari pendidikan brwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur, dan proses pendidikan. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan social kebijakan mekanisme pasar. Oleh karena itu, sistem dan struktur pendidikan harus bersifat terbuka.<sup>31</sup> Pendidikan tidak boleh stagnan, apalagi terhenti, dan bahkan mundur baik dalam arti teoritis maupun praktisnya.

#### G. Pendidikan Agama dalam System Pendidikan Nasional

Secara yuridis, posisi Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik pada UUSPN no. 2 tahun 1989 maupun dalam UUSPN nomor 2003. Pada UUSPN 1989 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

<sup>30</sup> Berdasarkan perspektif ini, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran yang dikembangkan tidak lagi bersifat monolitik melainkan lebih banyak yang bersifat integrative. dalam arti materi pelajaran ditekankan pada kajian yang bersifat multidisipner, interdisipliner, dan transdisipliner.

<sup>31</sup> Kebijakan pendidikan yang berada di antara kebijakan social dan mekanisme pasar memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata ditata dan diatur dengan menggunakan perangkat aturan yang serba seragam, rinci, dan instruktif. Melainkan pendidikan juga diatur layaknya mall, adanya kebebasan pemilik took untuk menentukan barang apa yang akan dijual dan dengan harga berapa yang akan dijual. Pemerintah tidak perlu mengaturnya secara rinci.

Dalam proses pembelajaran, kita perlu memahami bahwa ada paradigm baru mengenai kecerdasan. Kecerdasan itu meliputi a) visual/ spatial intelligence, b) verbal/linguistic intelligence, c) logical/mathematical intelligence, d) bodily/kinesthetic intelligence, e) musical/rhythmic intelligence, f) interpersonal intelligence, h) intrapersonal intelligence.



pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan. Sementara dalam UUSPN 2003 dinyatakan pada pasal 1 ayat 2, bahwa :”Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan zaman”, pasal 3 UUSPN 2003, “ pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi mausia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Mencermati UUSPN 2003 pada pasal 1 ayat 5 dan pasal 4 tersebut, terlihat begitu jelas bagaimana pendidikan agama memegang peranan yang sangat strategis jika disbanding dengan pendidikan lainnya. Tidak hanya beorientasi pada pengembangan IQ, akan tetapi juga mengembangkan EQ dan SQ secara integral

Samsul Nizar dalam bukunya menjelaskan, bahwa Pendidikan Islam paling tidak mengandung empat unsur yang kemudian dijadikan dustur kebudayaan suatu bangsa, yaitu :

1. Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan social
2. Unsur estetika untuk membentuk cita rasa umum
3. Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktivitas umum
4. Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada dalam ragam masyarakat.

Merujuk pada batasan di atas, maka praktik Pendidikan Islam merupakan penjabaran dari keempat unsur tersebut. Pendidikan Islam seyogyanya menjadi sarana pembentukan situasi berpengetahuan dan berakhlak mulia. Prosesnya bukan merupakan rangkaian indoktrinasi pengetahuan dan mencampakkan keempat unsur pendidikan diatas dalam bingkai yang terpilah-pilah. Proses pendidikan yang dilakukan seyogianya merupakan proses pemberian sejumlah informasi mengenai pengalaman untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sini peserta didik diarahkan untuk menemukan bentuk pengetahuan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan masa depannya yang pasti berbeda dengan lingkungan dan persoalan yang dialami seorang pendidik.<sup>33</sup>

#### H. Islam dan tujuan pendidikan

Pendidikan Islam pada prinsipnya adalah pendidikan iman dan pendidikan amal. Hal ini mengandung arti, bahwa melauai pendidikan manusia diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai agama yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.<sup>34</sup> Salah satu tokoh yang mencurahkan pikirannya dalam dunia pendidikan adalah Muhammad Abduh

<sup>32</sup> UU sisdiknas & pp no 32 tahun 2013 tentang perubahan pp no 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional

<sup>33</sup> Samsul Nizar, *Sejarah...xi*.

<sup>34</sup> Pada dasarnya Al-Qur’an secara gamblang telah mengemukakan dua kutub manusia, yaitu manusia yang *Ahsani Taqwim*, yakni kualitas terbaik, baik fisik maupun psikis, dan *Asfala Safilin* yakni kualitas terendah. Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (2004).



pada awal abad 19.<sup>35</sup> Dia berpendapat, bahwa diantara factor yang membawa kemunduran dunia Islam adalah karena adanya pandangan dikotomis yang dianut oleh umat Islam, yakni dikotomi atau mempertentangkan antara ilmu agama dan ilmu umum.<sup>36</sup> Berbagai lembaga Pendidikan Islam di dunia pada umumnya lebih mementingkan, dan kurang mementingkan ilmu umum.

Menurut Abduh, corak pendidikan yang demikian itu lebih banyak berdampak negatif dalam dunia pendidikan. Sistem madrasah lama akan menghasilkan ahli ilmu agama, sedangkan sekolah pemerintah mengeluarkan tenaga ahli yang tidak mempunyai visi dan wawasan keagamaan.<sup>37</sup> Keadaan seperti ini pernah terjadi di Negara kita Indonesia sebelum tahun 70-an, dimana pada waktu itu madrasah yang bernaung di bawah departemen (sekarang kementerian) agama hanya mengajarkan ilmu agama, sedangkan sekolah yang berada di bawah kementerian pendidikan kurang mementingkan agama.

Lebih lanjut Abduh berpendapat, untuk mengatasi masalah dikotomi yang demikian itu, maka diusulkan agar dilakukannya lintas disiplin ilmu antar kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga jurang pemisah antara kaum ulama dan ilmuan modern akan hilang.<sup>38</sup> Bagi Abduh, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dalam prosesnya mampu mengembangkan seluruh fitrah peserta didik, terutama fitrah akal dan agamanya. Dengan fitrah ini peserta didik akan dapat mengembangkan daya fikir secara rasional. Sementara melalui fitrah agama akan tertanam pilar-pilar kebaikan pada diri peserta didik yang kemudian terimplikasi dalam seluruh aktivitas hidupnya.<sup>39</sup>

Dalam konteks ini, tugas utama dunia pendidikan terutama pendidikan Islam adalah untuk mengembang seluruh potensi yang dimiliki oleh oleh peserta didik, sehingga mampu menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, dan pada akhirnya akan tercipta tananan social yang harmonis.

Tokoh lain yang mencurahkan perhatiannya dalam masalah Pendidikan Islam adalah Hasan Langgulung.<sup>40</sup> Menurut Hasan Langgulung, bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah sama dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu memikul

<sup>35</sup> Dilahirkan di Mesir pada tahun 1849.

<sup>36</sup> Walaupun secara terminology istilah ilmu agama vs ilmu umum kurang tepat, karena ilmu agama lawannya ilmu atheis, ilmu umum lawannya ilmu khusus, namun istilah ini sudah jamak digunakan dalam dunia pendidikan.

<sup>37</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 309., lebih lanjut baca : *Al-Madaris Al-Tajhiziyat Wa Al-Madaris Al-'Aliyat* karangan Muhammad Abduh dan *Al-'Ainal Kamil Li Al-Imam Muhammad Abduh, Juz III*.

<sup>38</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan...309*.

<sup>39</sup> Hal yang senada juga di gagas oleh Al-Syaibany, pelaksanaan Pendidikan Islam seyogianya lebih menekankan pada aspek agama dan akhlak di samping intelektual rasional. Penekannya bersifat menyeluruh dan memerhatikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, yang meliputi potensi intelektual, psikologis, social, dan spiritual secara seimbang dengan pelbagai ilmu pengetahuan lainnya (seni, pendidikan jasmani, militer, teknik, bahasa asing, dan lainnya), sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Lebih jelas lihat Omar Muhammad Al-Taomy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 503.

<sup>40</sup> Lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 1934. Dia adalah orang yang memiliki perhatian dalam bidang psikologi yang erat kaitannya dengan pendidikan.



amanah Allah swt. Dimuka bumi dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Tujuan ini lebih lanjut diperinci menjadi :

- 1) Membina generasi muda agar menyembah Allah swt. Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
- 2) Mendidik generasi muda agar dapat hidup di masyarakat dengan mengakui adanya prinsip kerjasama, persaudaraan, dan kebersamaan.
- 3) Mendidik generasi muda agar menggunakan akal pikirannya dengan cermat dan produktif.
- 4) Membentuk pribadi yang suka terbuka dan bergaul dengan orang lain, serta menjauhi sikap menyendiri dan menonjolkan diri.
- 5) Mendidik generasi muda agar menggunakan pikiran ilmiah.<sup>41</sup>

Selain itu, Hasan Langgulung juga berpendapat sebagaimana yang ditulis abuddin nata, bahwa tujuan pendidikan agar diarahkan pada : 1) Pembentukan insane yang saleh, yaitu manusia yang mendekati kesempurnaan yang ditandai oleh memiliki rasa harga diri, perikemanusiaan, esucian, kasih sayang, kecintaan, kesehatan jasmani dan rohani, penguasaan diri, dinamis, tanggung jawab, jujur, ikhlas, memerintah yang ma'rif dan menjauhi yang mungkar, memiliki rasa keindahan dan keseimbangan dalam hidup. 2) Pengembangan masyarakat yang saleh, yaitu masyarakat yang percaya bahwa ia memiliki dan mengemban misi kebenaran dan kebaikan.

Dengan tercapainya dua tujuan ini, maka akan tercipta keseimbangan hidup individual dan social, serta keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, perasaan, dan indera.<sup>42</sup>

Berdasarkan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh oleh dua tokoh di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk insane kamil, yang mampu mengembangkan potensi (fitrah) yang ada pada masing-masing individu yang meliputi intelektual, emosional, dan spiritual secara berimbang, sehingga akan tercipta manusia yang mampu memainkan peran sebagai khalifah di muka bumi. Islam juga memberikan prinsip-prinsip landasan bagi manusia untuk mengembangkan potensi kejiwaan yang berupa fikir, kehendak, perasaan, dan lain sebagainya

## I. Epilog

Perubahan serta tantangan yang ada di dalam dunia pendidikan kerap kali menjadi kendala bagi sebuah Negara berkembang dan mikskin untuk maju dan ikut bersaing dengan negara lainnya. Seperti negara kita Indonesia, dibutuhkan kesadaran lebih akan urgensi pendidikan, baik dari masyarakat, peserta didik, pendidik, dan lebih-lebih pemerintah sendiri.

Dari uraian-uraian di atas dapat difahami bahwa untuk memahami makna pendidikan yang sebenarnya, pendidikan ditujukan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan peserta didik. Oleh karena itu proses pendidikan bukan hanya sekadar

<sup>41</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran...*342.

<sup>42</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran...*343.





*transfer of knowledge*, tapi proses pembelajaran juga harus meliputi *transfer of value and skill*, serta pembentukan karakter (*character building*).

Selanjutnya harus ditanamkan pola pendidikan yang berorientasi pada proses (*process oriented*), dimana proses lebih penting daripada hasil, bukan berarti menganggap hasil tidak penting. Tetapi pendidikan harus berjalan di atas rel ilmu pengetahuan yang substantive. Oleh karena itu, budaya pendidikan yang berorientasi hasil (formalitas ansih) seperti mengejar gelar atau title oleh praktisi pendidikan dan pendidik harus dibuang sejauh mungkin. Yang harus ditekankan dalam pendidikan kita adalah penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan keilmuan yang dihiasi dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan adat ketimuran. Di samping itu juga pendidikan harus bersifat inklusif atau terbuka, pendidikan tidak boleh eksklusif atau alergi dengan perubahan dan perkembangan ilmu modern yang lahir di dunia barat. Yang terpenting adalah bagaimana meramu dan mewarnainya dengan nilai-nilai ke-Islaman universal.

Sebagai agama terahir, Islam telah memberikan ajarannya secara totalitas dan universal (*alyauma akmaltu lakum dinakum*). Sehingga memberikan persepsi bahwa Islam juga hadir dengan menawarkan konsep-konsep dalam pendidikan bagi umat manusia, terutama tentang penanaman nilai-nilai ajarannya yang luhur dalam membentuk suatu kultur social yang relegius. Proses pendidikan yang dilakukan dalam rangka mentransfer pengetahuan tentang nilai dan moral yang menyentuh ranah kognitif, serta mendapatkan *follow up* pada afektif dan psikomotorik

Dan yang terahir perlunya dukungan yang komprehensif serta partisipasi terhadap keberlangsungan pendidikan, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan memiliki tanggungjawab sehingga pendidikan dapat di akses secara mudah dan berkualitas.



## Referensi

- Abuddin Nata. 2012. *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (ed). 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ali idrus. 2009. *Manajemen Pendidikan Global “Visi, Aksi & Adaptasi”*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Azzyumardi Azra. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*. Jakarta: Logos.
- E. Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Rosda Karya.
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- PP RI nomor 25 tahun 2000 yang mengatur Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- Paulo Freire. 1999. *Politik pendidikan “Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan”*. Cet IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sam. M. Chan & Tutik. T. 2007. *Analisi SWOT “Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Samsul Nizar (ed). 2013. *Sejarah Pendidikan Islam “Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana MG.
- Syaipul Sagala. 2013. *Organisasi Pendidikan “Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Susan Albert Mohrman. 1994. Priscilla Wholsteter And Associates “*School Based Management*. San Francisco : Jossey Bass.
- UU Sisdiknas & PP no. 32 tahun 2013 tyentang Perubahan PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional